

---

<b>Judul</b>	: Marak penipuan global, legislator sarankan berantas scamming
<b>Tanggal</b>	: Sabtu, 07 Februari 2026
<b>Surat Kabar</b>	: Rakyat Merdeka
<b>Halaman</b>	: 3

Marak Penipuan Global

## Legislator Sarankan Berantas Scamming

SENAYAN menyoroti laporan Global Fraud Index 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling rentan terhadap praktik penipuan secara global. Indeks tersebut dirilis oleh Sumsub, perusahaan teknologi perangkat lunak asal Inggris yang fokus pada pencegahan kejahatan finansial.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, laporan Global Fraud Index 2025 menguatkan fakta terkait maraknya kasus penipuan online atau scamming yang menimpak masyarakat Indonesia. Masyarakat banyak menjadi korban penipuan online, baik melalui media sosial (medsos), aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. "Dampaknya tidak kecil, karena kerugian yang dialami korban sangat besar," ujarnya.

Diketahui, Global Fraud Index 2025 disusun berdasarkan empat indikator utama. Yaitu, tingkat dan jumlah kasus penipuan yang terjadi, ketersediaan sumber daya untuk mencegah penipuan. Lalu, kemampuan serta kebijakan Pemerintah dalam menangani dan menekan kejahatan penipuan, dan terakhir kondisi ekonomi yang berpo-

tensi mendorong meningkatnya aksi penipuan.

Dengan indikator tersebut, Indonesia mencatat skor 6,53 poin. Artinya, Indonesia menempati peringkat ke-111 dari total 112 negara yang diteliti, atau berada di posisi kedua paling rentan terhadap penipuan di dunia. Sedangkan negara yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dari Indonesia adalah Pakistan, dengan skor mencapai 7,48 poin.

Oleh melanjutkan, tingginya angka kerentanan Indonesia terhadap penipuan digital menunjukkan perlunya langkah yang lebih serius dan terkoordinasi dari Pemerintah, utamanya dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Karena itu, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.

Dia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga instansi terkait lainnya, untuk duduk bersama dan membahas strategi penanganan penipuan digital. "Seluruh stakeholder harus duduk satu meja. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,"

SUMBER WEB PKB



Oleh Soleh

saran politikus PKB ini.

Kata dia, perlu ada peta jalan yang jelas dan terukur dalam menangani kasus penipuan yang semakin marak. Pemerintah harus segera mewujudkan pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Alasannya, perlindungan data pribadi adalah kunci dalam mencegah penipuan digital.

"Tanpa BPDP yang kuat dan berfungsi optimal, upaya pencegahan akan selalu tertinggal dari modus kejahatan yang terus berkembang," kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini.

Anggota Komisi XI DPR Didik Haryadi menambahkan, penipuan digital, khususnya love scam atau penipuan asrama banyak menjerat pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Akibatnya, mereka pulang ke Tanah Air tanpa membawa apa-apa karena menjadi korban.

Menurutnya, salah satu negara yang perlu menjadi perhatian serius adalah Hong Kong. Di negara ini tercatat memiliki sekitar 180 ribu PMI. Jumlah tersebut dinilai sangat rentan terhadap berbagai modus penipuan digital, terutama love scam yang memanfaatkan relasi personal dan medsos.

"Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian negara, karena perlindungan warga negara tidak mengenal batas wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri," tegas Didik dalam keterangan, Kamis (5/2/2026).

Dia mengingatkan, penipuan digital tidak hanya terbatas pada scam berbasis hubungan personal. Kejahatan teknologi lainnya seperti peretasan data, pencurian identitas, phishing melalui surat elektronik, hingga penyebaran malware dan virus yang merusak sistem informasi juga marak.

Karena itu, penanganan scam harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari pemahaman pola kejadian, langkah pencegahan agar tidak terulang, hingga mekanisme penanganan yang jelas saat penipuan telah terjadi.

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus membangun skema deteksi dini yang kuat, termasuk edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis penipuan digital yang terus berkembang," desak politikus PDIP ini.

Selain itu, ia menyoroti keberbatasan jangkauan informasi terkait satuan tugas dan pusat pengaduan antiscam yang belum menyentuh masyarakat luas, terutama di wilayah pedesaan. Dengan itu, OJK harus menghadirkan informasi yang mudah diakses melalui ruang publik hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Bila masyarakat di kampung hanya bermain ponsel lalu tertipu karena iming-iming sederhana, maka mereka harus tahu ke mana harus mengadu. "Informasi tentang Indonesia Anti-Scam Center harus disosialisasikan secara aktif, bukan menunggu masyarakat mencari sendiri," pungkasnya. ■ TIF